

PENGAJIAN PENINGKATAN DAYA SAING USAHA KECIL MENENGAH YANG BERBASIS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

ABSTRACT

This study has an aim to study pre-eminent commodity in the area which are owning potential to be improved their competitiveness and to study models of local economic development in improving its competitiveness.

The study result indicates that almost all sub-province area / town have specified their pre-eminent commodity. Determination process of pre-eminent commodity is generally based on capacities produce without trying to study their competitiveness from the commodity compared to other area.

Technical efficiency of Small & Medium Enterprises (SMEs) which residing in central relatively higher compared to technical efficiency of SMEs outside centra . This happens because of process construction of SMEs residing in central by various governmental institution relative more intensive compared to UKM outside centra (non-centra).

Improvement model of SMEs competitiveness emphasize at the effort in forming of SMEs cluster. SMEs cluster is supported by : a) natural source and human being and also local economics; b) partner program; and c) reinforcement support in the form of finance and non-finance. The reinforcement support is stem from center government or local, financial institution, BUMN/ BUMD, and private sector. The existence of the SMEs cluster is expected to assist SMEs in accessing market, improving export ability, creating pre-eminent competitive and exploiting information technology.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan berpihak pada rakyat. Selaras dengan pasal 33 UUD 1945, GBHN Tahun 1999 menekankan berjalannya demokrasi ekonomi dengan meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha kecil serta menengah. Amanat GBHN tahun 1999 tersebut tersurat dalam arah kebijakan ekonomi butir II, yaitu memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Arah kebijakan ekonomi butir II merupakan dukungan perkuatan kepada pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, memberikan pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan pelatihan, dukungan teknologi, permodalan, dan lokasi usaha yang strategis.

**) Penelitian ini dilaksanakan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK tahun 2005 (diringkas oleh Togap Tambunan dan Paruhuman Nasution)*

Upaya peningkatan daya saing UKM pada tingkat menteri tercermin dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 71/Kep/Meneg/VII/2000 tentang Pedoman Kelembagaan UKM dengan sasaran menghasilkan koperasi dan UKM yang memiliki daya saing dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM melalui pengembangan komoditas unggulan. Selanjutnya pada tataran strategis, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyusun Rencana strategis Pembangunan KUKM.

Pada tataran realitas terutama pada masa Orde Baru belum mengalami UKM kurang mendapat perhatian dan terpinggirkan dibandingkan usaha besar dan gerak perekonomian nasional. Namun UKM pada masa krisis ekonomi pada tahun 1997 telah membuktikan perannya sebagai katup pengaman perekonomian nasional. Pada tahun 2000, BPS mencatat sumbangan koperasi dan UKM terhadap pendapatan nasional mencapai 56,3 persen, sedangkan sisanya berasal dari kelompok ekonomi besar dan konglomerasi. Sektor ekonomi kerakyatan tidak dapat dianggap kecil, tetapi dapat dipandang sebagai suatu potensi yang besar. Upaya yang dapat dilakukan agar UKM memiliki daya saing, antara lain dengan menjalin kerjasama dengan usaha besar atau sesama UKM, penciptaan keunggulan kompetitif, manajemen yang tepat, teknologi tepatguna, dan inovasi yang berkesinambungan.

Kebijakan pengembangan UKM masih mengalami distorsi, sehingga tujuan dan sasarannya belum tercapai secara optimal. Untuk menghilangkan distorsi tersebut, stakeholder, pemerintah, non pemerintah melakukan upaya peningkatan daya saing secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain berperan sebagai penyedia BDS. Peningkatan daya saing secara bertahap artinya peningkatan daya saing dimulai dengan upaya memenangkan persaingan pada tingkat lokal. Kemudian dikembangkan untuk wilayah /kawasan yang makin meluas sehingga secara hirarkis pelaku bisnis lokal dapat turut bermain dan memenangkan persaingan secara bertahap dan alamiah. Dan untuk mengetahui berbagai kondisi riil yang melemahkan daya saing UKM, maka dilakukan kajian yang mendalam untuk menemukan solusi dalam rangka meningkatkan daya saing UKM berbasis ekonomi lokal.

1.2. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah

Identifikasi masalah/kebutuhan stakeholder sebagai langkah awal penelitian yang dilaksanakan meliputi; (a). Identifikasi siapa stakeholder, (b). Identifikasi kepentingan masing-masing stakeholder, (c) Identifikasi gap kepentingan stakeholder, dan identifikasi hubungan sebab akibat, dan (d). Identifikasi kebutuhan primer dan sekunder stakeholder.

Berdasarkan identifikasi kebutuhan stakeholder, akan diformulasikan permasalahan pengembangan daya saing UKM berbasis ekonomi lokal, sebagai berikut; (a). Pemahaman ekonomi lokal dari aspek kelembagaan sampai dengan indikator perkembangannya, (b). Pemahaman tentang daya saing UKM meliputi: pengertian daya saing, indikator daya saing komoditas unggulan UKM dan perekonomian lokal, (c). Keterkaitan antara pengembangan ekonomi lokal dan daya saing UKM, dan (d). Kemungkinan replikasi model peningkatan daya saing UKM berbasis pengembangan ekonomi lokal.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Kajian ini bertujuan untuk: (a). Mengkaji komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi untuk ditingkatkan daya saingnya, dan (b). Mengkaji model-model pengembangan ekonomi lokal dalam meningkatkan daya saingnya.

Sasaran yang diharapkan dari kajian ini; (a). Tersedianya hasil inventarisasi model pengembangan UKM yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal, (b). Tersedianya hasil identifikasi model pengembangan ekonomi lokal dalam meningkatkan daya saingnya, (c). Tersedianya hasil kajian mengenai komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan daya saingnya, dan (d) Tersedianya model pengembangan ekonomi lokal dalam meningkatkan daya saing UKM. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan, instansi dan lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan daya saing UKM yang berbasis pada ekonomi lokal pada khususnya dan pemberdayaan UKMK pada umumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Pembangunan Ekonomi Lokal

Dari literatur tentang pembangunan ekonomi antara lain disebutkan bahwa: a) pembangunan memfokuskan pada pengurangan kemiskinan, pembangunan perdesaan, polarisasi sosial serta perubahan pola pikir; b) terminologi lokal atau daerah ekonomi menggambarkan area geografis suatu kekuasaan pemerintahan; c) daya saing adalah kemampuan suatu usaha untuk menciptakan keseimbangan baru.

Terminologi lokal atau daerah ekonomi digunakan untuk menggambarkan area geografis dari suatu kekuasaan pemerintah yang memiliki basis ekonomi yang berdekatan serta diperbolehkannya penduduk untuk bekerja, berkreasi serta shopping didaerah tersebut. Pembangunan ekonomi lokal dimaksudkan untuk menggambarkan proses dimana pemerintah daerah maupun masyarakat mengorganisir aktifitas bisnis maupun lapangan kerja untuk tujuan bersama. Tujuan dari pembangunan ekonomi lokal adalah untuk memberikan kesempatan kerja serta mampu memperbaiki masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada. Dengan demikian pemerintah lokal dapat saja berwujud pemerintahan propinsi, kota/kabupaten, kecamatan bahkan kumpulan desa/kelurahan

2.2. Kerangka Pikir

Dalam konteks desentralisasi ekonomi maka setiap daerah harus kreatif, artinya mampu mengembangkan ekonomi daerahnya dan memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah. Proses kreatif ini pada akhirnya akan memunculkan komoditas unggulan yang berbasis pada ekonomi lokal dan mampu bersaing di pasar domestik maupun skala ekspor.

Pengembangan ekonomi lokal adalah merupakan suatu konsep pengembangan

ekonomi yang mendasarkan pada pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya kelembagaan lokal yang ada pada suatu masyarakat, oleh masyarakat itu sendiri melalui pemerintah lokal maupun kelembagaan berbasis masyarakat yang ada.

Berdasarkan kedua pengertian pengembangan ekonomi lokal di atas, dapat disusun pengertian pengembangan ekonomi lokal dalam konteks Indonesia, yaitu kerjasama masyarakat lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan mendayagunakan sumberdaya lokal yang ada pada suatu masyarakat.

Pengembangan ekonomi lokal dilakukan oleh para stakeholder (pemerintah lokal, swasta dan masyarakat lokal) dan menitikberatkan pada peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta penciptaan lapangan kerja yang dirancang dan dilaksanakan secara spesifik untuk setiap komoditas atau wilayah, serta peran aktif atau insiatif dari para stakeholder.

Pendekatan strategis untuk mengatasi kelemahan UKM secara individual adalah melakukan kerjasama antar perusahaan atau UKM. Kerjasama tersebut untuk mencapai skala ekonomis, saling berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki posisi kompetisinya, dan pada akhirnya akan menghasilkan produk unggulan yang berbasis pada ekonomi lokal.

III. METODE KAJIAN

3.1 Lokasi dan Responden Kajian

Lokasi kajian meliputi: Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan.

Responden Penelitian adalah para stakeholder di setiap wilayah penelitian sehingga gambaran mengenai persepsi mereka dapat mewakili keadaan populasi pada umumnya. Responden penelitian di wilayah sampel terdiri dari :

1. Aparatur pemerintah pada Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, dan pengurus sentra, sebanyak 21 sampai dengan 50 orang
2. UKM di lingkungan sentra, berjumlah antara 75 sampai dengan 250 uni, terdiri dari UKM yang baik, sedang dan tidak berkembang
3. Bank, Gerakan Koperasi (Dekopin), LSM, Pers, dan Asosiasi Perguruan Tinggi.

3.2 Variabel Penelitian

Penelitian ini akan mengungkapkan persepsi stakeholders mengenai Peningkatan Daya Saing UKM berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal. Untuk itu variabel penelitian meliputi:

- a. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah tenaga kerja.

- b. Komoditas unggulan, berupa keunggulan komparatif dan kompetitif
- c. Sentra, meliputi nilai investasi, jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai bahan baku, dan nilai produksi.
- d. UKM di wilayah sentra, mencakup aspek tenaga kerja, produksi, permodalan, pemasaran, persaingan dan kewirausahaan.

3.3. Teknik dan Analisis Data

Data primer berupa data hasil pengamatan lapang dari UKM dan sentra yang bersifat kuantitatif di wilayah sampel dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi komoditas tertentu dengan menggunakan regresi berganda. Data sekunder berupa dokumen, publikasi yang bersumber dari Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Pusat Statistik, dianalisis guna menentukan produk unggulan wilayah sampel. Sedang untuk menentukan kinerja UKM menggunakan alat analisa probit/logit. Dari hasil analisis dapat diketahui cut off perkembangan atau keberhasilan UKM. Dalam menganalisa daya saing komoditas UKM menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan pendekatan Effective Rate of Protection, Domestic Resource Cost dan Reveald Comparative Advantage.

3.4. Tahapan Penelitian

Tahapan survey lapang yang dilaksanakan sebagai berikut; (a). Menetapkan responden dan stakeholder yang akan dilibatkan, (b). Survey lapangan: observasi, mengisi kuesioner, wawancara dan diskusi, (c). Tabulasi data dan (d). Analisis data dan penilaian komoditas unggulan serta perkembangan ekonomi lokal. Kemudian akan dilakukan inventarisasi dan identifikasi model daya saing UKM berbasis ekonomi lokal untuk mendata peta komoditas unggulan didaerah sampel dan mendata berbagai model ekonomi lokal dalam meningkatkan daya saing UKM. Rekomendasi kebijakan akan disusun terutama untuk komoditas unggulan dan rekomendasi model peningkatan daya saing UKM berbasis ekonomi lokal. Langkah akhir tahapan penelitian akan dilakukan Sosialisasi Policy Paper melalui diskusi kelompok terarah dengan stakeholder pemerintah daerah.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 DISKRIPSI RESPONDEN

Komposisi responden berdasarkan propinsi/wilayah penelitian dalam kajian ini yaitu; provinsi Sulawesi Selatan 31,6 %, Jawa timur 19,0 %, Jawa Barat 17,7%, Nusa Tenggara Barat 6,3 %, Sumatera Selatan 6,3 %, Sumatera Utara 12,7 % dan Kalimantan Selatan 6,3 % dari jumlah responden. Dilihat dari sisi usia, sebagian besar responden berusia 31 – 40 tahun kemudian usia 41 – 50 tahun merupakan urutan besar kedua. Berdasarkan tingkat pendidikan komposisi responden yaitu; SD 14,8%, SMP 23,2 %,

SMA 49,7%, Diploma 5,2 % dan S1 sebesar 7,1 %. Sedangkan berdasarkan bentuk badan usaha komposisi responden yaitu; CV 41,9%, UD 54,8% dan TDI sebesar 3,2 %.

4.2. Gambaran Umum UKM contoh.

Menurut responden ada sekitar 32 jenis produk UKM yang mewakili dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan beraneka ragam produk yang dihasilkan oleh UKM memiliki potensi untuk dikembangkan. Sebagian besar UKM (59,4 %) memiliki tenaga kerja sebanyak 1-10 orang, dengan demikian tergolong dalam usaha kecil. Sedangkan yang termasuk dalam usaha menengah (lebih dari 50 orang) sekitar 4,5%. Secara terinci jumlah tenaga kerja UKM contoh adalah sebagai berikut: a) 1-10 orang sebanyak 59,4%, b). 11-20 orang sebanyak 21,3%, c) 21-30 orang sebanyak 10,3 %, d). 31-40 orang sebanyak 3,9%,e) 41-50 orang sebanyak 0,6%, dan e) lebih dari 50 orang sebanyak 4,5 %.

UKM dalam melakukan produksi relatif tidak menghadapi kendala bahan baku, karena bahan baku yang digunakan berasal dari lokal , berasal sumberdaya alam. Dalam hal permodalan, khususnya modal awal yang digunakan ditunjukkan sebagai berikut: a) yang memulai usaha dengan modal awal kurang dari atau sama dengan Rp. 10 juta (53,8%). B) dengan modal awal Rp 11 juta – Rp 20 juta (15,2%), c) modal awal Rp. 21 juta-Rp 40 juta (12,4%). Modal perusahaan sebagian besar berasal dari modal sendiri, hanya 15%-20% yang berasal dari Bank. Dalam memperoleh dana dari bank responden menilai sulit sebesar 63,2% dan prosedur peminjaman yang berbelit (43%) menyebabkan UKM kesulitan memperoleh dana pihak luar. Pada umumnya UKM memasarkan sendiri produk yang dihasilkan daripada menggunakan jaringan distribusi. Barang yang dihasilkan merupakan shopping goods bukan convenience goods, sehingga tidak memerlukan banyak saluran distribusi dalam memasarkannya.

4.3. Perekonomian Lokal Dan Daya Saing

Terminologi lokal atau daerah ekonomi digunakan untuk menggambarkan area geografis dari suatu kekuasaan pemerintah yang memiliki basis ekonomi yang berdekatan serta diperbolehkannya penduduk untuk bekerja, berekreasi serta shopping didaerah tersebut. Pembangunan ekonomi lokal dimaksudkan untuk menggambarkan proses dimana pemerintah daerah maupun masyarakat (yang bertetangga) mengorganisasi aktifitas bisnis maupun lapangan kerja untuk tujuan bersama. UKM sebagai pelaku ekonomi sepantasnya memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi suatu wilayah apalagi UKM membuktikan sebagai penyelamat perekonomian nasional pada masa Indonesia dihantam badai krisis ekonomi.

1). Perekonomian di Sumatera Utara

Hasil estimasi berdasarkan nilai tambah maupun nilai tambah per Unit Usaha menunjukkan bahwa indikator-indikator perekonomian kurang bersahabat dengan UKM.

2). Perekonomian di Sumatera Selatan.

Perkembangan perekonomian kurang mendukung perkembangan UKM di daerah

tersebut. Hasil estimasi per nilai tambah maupun nilai tambah per unit usaha (UKM) menunjukkan bahwa indikator perekonomian hanya sedikit berpengaruh terhadap pertumbuhan UKM.

3). Perekonomian di Jawa Barat

Realita yang dijumpai di Jawa Barat berbeda dengan provinsi lainnya. Di Provinsi Jawa Barat indikator ekonomi seperti pertumbuhan PAD, APBD, PDRB dan indikator lainnya tidak berpengaruh sama sekali terhadap nilai tambah maupun nilai tambah per UKM.

4). Perekonomian di Jawa Timur

Rasio PAD terhadap APBD berdasarkan hasil estimasi memiliki pengaruh yang berarti dan positif terhadap nilai tambah. RPAD juga berpengaruh nyata dan positif terhadap nilai tambah per UKM. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah Jawa Timur mempunyai kepedulian terhadap kinerja UKM.

5). Perekonomian di Nusa Tenggara Barat

Indikator perekonomian di Nusa Tenggara Barat yang berpengaruh terhadap nilai tambah maupun nilai tambah per UKM sangatlah sedikit. Dari 13 indikator yang dinilai hanya Indeks Pendapatan Perkapita (DKAP) dan Pendapatan Perkapita (IKA) yang signifikan itupun bertanda negatif. Ini berarti penduduk tidak tertarik untuk membeli produk yang dihasilkan oleh UKM, sehingga produk yang dihasilkan harus dipasarkan diluar NTB.

6). Perekonomian di Sulawesi Selatan.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran (UN) berpengaruh secara bermakna dan negatif terhadap nilai tambah. Ini menunjukkan penduduk usia produktif memiliki potensi mengembangkan UKM sendiri karena pengangguran belum terserap oleh UKM. Agar pengangguran terserap maka kualitas SDM perlu ditingkatkan baik melalui pendidikan maupun pelatihan yang memadai.

7). Perekonomian di Kalimantan Selatan

Hasil estimasi indikator juga tidak begitu memuaskan bagi laju peningkatan nilai tambah. Dari hasil estimasi secara individu terhadap nilai tambah, tak satupun indikator yang mempunyai pengaruh terhadap nilai tambah. Jika diestimasi dengan nilai tambah per UKM maka rasio PAD terhadap APBD mempunyai makna berarti positif.

Secara terinci hasil estimasi indikator perekonomian dengan basis Nilai Tambah per unit usaha berdasarkan hasil survey seperti ditunjukkan oleh tabel berikut:

| No | Provinsi | Variabel Terkait | Koefisien | | Intersep | Adj.R2 |
|----|----------|------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | | | Log RPAD | Log RGPD | | |
| 1 | Sumut | Log NT/UKM | 3.08 | 11.93 | 11.93 | 0.6293 |
| 2 | Jabar | Log NT/UKM | 0.22 | - 5.35 | 8.84 | -0.0465 |
| 3 | Jatim | Log NT/UKM | 13.69 | 426.78 | -1151.59 | 0.3119 |
| 4 | NTB | Log NT/UKM | -1.74 | 4.51 | -0.32 | 0.9722 |
| 5 | Kalsel | Log NT/UKM | 1.39 | 4.68 | 9.04 | 0.2117 |
| 6 | Sumsel | Log NT | 79.05 | - 0.26 | -99.02 | 0.4491 |
| 7 | Sulsel | Log NT | - 9.60 | - 1.02 | 18.80 | 0.2420 |

Dari hasil kajian sebagaimana diuraikan diatas pembangunan ekonomi lokal secara umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan kinerja sentra UKM yang diukur dengan laju perubahan nilai tambah dan produktivitasnya. Indikator tersebut mengindikasikan belum adanya keterkaitan yang berarti antara dinamika perkembangan ekonomi lokal dengan sentra UKM.

4.4 Daya Saing UKM

Untuk mengukur daya saing suatu komoditas dapat digunakan 3(tiga) alat analisis, yaitu: Effective Rate of Protection (ERP), Domestic Resources Cost (DRC) dan Reveal Comparative Advantage (RCA). ERP adalah alat analisis yang mampu mengindikasikan pengalokasian sumber daya yang dipengaruhi struktur proteksi yang diterapkan. ERP juga menjelaskan perlu tidaknya suatu proyek diberi proteksi efektif terhadap persaingan internasional agar dapat bertahan hidup. DRC merupakan metode perhitungan ratio manfaat biaya yang mewakili nilai sosial dari penggunaan sumber daya dalam negeri per unit devisa yang dihasilkan dari ekspor produk-produk tertentu. Apabila nilai DRC dibandingkan dengan nilai SER maka dapat diketahui suatu komoditas yang dihasilkan oleh suatu industri yang memiliki keunggulan komparatif atau tidak. RCA berperan untuk mengukur kinerja ekspor komoditas suatu negara dengan mengevaluasi peranan komoditas tersebut dalam perdagangan internasional.

Hasil perhitungan terhadap 251 komoditas selama periode 1997-2000 dengan metode ERP dan DRC menunjukkan jumlah komoditas yang memiliki kelayakan bersaing rata-rata hanya 15,94 persen (ERP) dan 16,74 persen (DRC) dari total komoditas yang dihitung. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar komoditas Indonesia belum memiliki daya saing untuk bertempur di pasar, terutama pasar internasional. Hasil Perhitungan ERP dan DRC komoditas Indonesia disajikan dalam Tabel 1, 2 dan 3 sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Kelayakan Bersaing Komoditas Indonesia 1997-2000

| Tahun | >1 | % | <1 | % | 0 | % |
|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1997 | 40 | 17,09 | 171 | 73,08 | 24 | 9,83 |
| 1998 | 10 | 4,27 | 203 | 86,75 | 24 | 9,83 |
| 1999 | 1 | 0,43 | 206 | 88,03 | 29 | 11,54 |
| 2000 | 35 | 14,96 | 176 | 75,21 | 24 | 9,83 |
| Rata-rata | 21,50 | 9,19 | 189,00 | 80,77 | 29,75 | 10,26 |

Tabel 2

Rekapitulasi Komoditas yang Memiliki Keunggulan Komparatif 1997-2000

| DRC/SER | 1997 | % | 1998 | % | 1999 | % | 2000 | % |
|----------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| <0 (Layak) | 47 | 18,73 | 34 | 13,55 | 40 | 15,94 | 47 | 18,73 |
| >1 (Tak Layak) | 204 | 81,27 | 217 | 86,45 | 211 | 84,06 | 204 | 81,27 |
| Total | 251 | 100 | 251 | 100 | 251 | 100 | 251 | 100 |

Tabel 3.

Perkembangan RCA Komoditas Indonesia 1997-2000

| Tahun | >1 | % | <1 | % | 0 | % |
|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1997 | 40 | 17,09 | 171 | 73,08 | 24 | 9,83 |
| 1998 | 10 | 4,27 | 203 | 86,75 | 24 | 9,83 |
| 1999 | 1 | 0,43 | 206 | 88,03 | 29 | 11,54 |
| 2000 | 35 | 14,96 | 176 | 75,21 | 24 | 9,83 |
| Rata-rata | 21,50 | 9,19 | 189,00 | 80,77 | 29,75 | 10,26 |

Perhitungan berdasarkan RCA diperoleh hasil yang relatif senada dengan metode ERP dan DRC bahwa hanya sebagian kecil (rata-rata 9,19% dari total komoditas) komoditas Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif sehingga mampu bersaing di pasar dunia dan layak dikembangkan untuk tujuan ekspor.

Dari ketiga ukuran daya saing suatu komoditas di atas dapat dinyatakan bahwa daya saing komoditas Indonesia relatif lemah karena belum dapat menembus pasar dunia. Dengan demikian dapat diduga bahwa komoditas-komoditas yang mampu menembus pasar dunia karena memiliki daya saing yang bersumber pada sumber daya alam atau upah tenaga kerja yang murah. Di sisi lain rendahnya kemampuan komoditas Indonesia menembus pasar ekspor disebabkan oleh kelemahan struktural dan kelemahan manajerial.

Model peningkatan daya saing UKM menekankan pada usaha pembentukan kluster UKM. Kluster UKM tersebut didukung oleh: a) sumberdaya alam dan manusia serta perekonomian lokal; b) program kemitraan; dan c) dukungan perkuatan berupa keuangan dan non keuangan. Dukungan perkuatan tersebut bersumber dari pemerintah pusat/lokal, lembaga keuangan, BUMN/BUMD, dan swasta. Keberadaan kluster UKM tersebut diharapkan membantu UKM dalam mengakses pasar, peningkatan kemampuan ekspor, menciptakan keunggulan kompetitif, dan memanfaatkan teknologi informasi.

4.5. Komoditas Unggulan

Hasil kajian mengindikasikan hampir seluruh daerah kabupaten/kota telah menetapkan komoditas unggulan daerah. Proses penetapan komoditas unggulan umumnya didasarkan pada kapasitas produksi tanpa mencoba mengkaji keunggulan bersaing dari komoditas tersebut dibandingkan daerah lainnya. Hal ini menyulitkan bagi pemerintah daerah untuk menstimulir pengembangan komoditas unggulannya, karena ketidakjelasan variabel yang harus distimulir untuk mengembangkan daya saing komoditas tersebut. Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM perlu mengkoordinasikan kebijakan penentuan komoditas unggulan dan andalan daerah yang kriterianya di

dasarkan pada konsep keunggulan bersaing, sehingga akan memudahkan pemerintah kabupaten/kota dalam menstimulir pengembangan komoditas unggulan daerahnya.

Berdasarkan pendapat dari Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, dan FGD, kriteria komoditas unggulan sebagai berikut :

- ' Menggunakan bahan baku lokal;
- ' Sesuai dengan potensi dan kondisi daerah;
- ' Memiliki pasar yang luas;
- ' Mampu menyerap tenaga kerja relatif banyak;
- ' Merupakan sumber pendapatan masyarakat;
- ' Volume produksi relatif besar dan kontinyu;
- ' Merupakan ciri khas daerah;
- ' Memiliki daya saing yang relatif tinggi;
- ' Memiliki nilai tambah relatif tinggi;
- ' Dapat memacu perkembangan komoditas yang lain.

4.6. Kebijakan finansial pemerintah kabupaten/kota

Kebijakan finansial pemerintah kabupaten/kota secara umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan kinerja sentra UKM di daerahnya, kecuali untuk daerah provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan prioritas pengeluaran pembangunan di daerah umumnya belum pada sentra UKM dan cenderung memprioritaskan pada pembangunan lainnya. Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM perlu menstimulir dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan sentra UKM di wilayahnya. Hal ini dapat ditempuh dengan pengalokasian dana pengembangan sentra UKM untuk suatu daerah (MAP, BDS-P, pelatihan dan lain-lain, didasarkan pada ketersediaan dana padanan di daerah, kecuali untuk daerah yang minus. Untuk itu, perlu ditetapkan parameter penganggaran untuk pembangunan sentra pada masa mendatang.

4.7. Dinamika Sentra UKM

Efisiensi UKM yang berada di dalam sentra relatif lebih tinggi dibanding yang di luar sentra. Namun UKM diluar sentra menggunakan tenaga kerja lebih rasional dibandingkan UKM di dalam sentra. Penggunaan tenaga kerja di dalam sentra cenderung telah jenuh, sehingga penambahannya dapat mengurangi produktivitas dari sentra UKM tersebut.

Sentra dengan jumlah UKM lebih dari 30 orang pengusaha, relatif lebih dinamis dari pada sentra yang memiliki dibawah 30 orang. Namun demikian sentra yang kecil umumnya memiliki efisiensi teknis yang lebih baik dibandingkan sentra yang besar. Hal ini mengindikasikan pola pembinaan sentra UKM selama ini tidak berkesinambungan. Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM perlu merumuskan pola pembinaan sentra UKM yang berkesinambungan serta mensosialisasikan upaya pembinaan sentra UKM tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota agar mampu

membina sentra UKM secara berkesinambungan melalui BDS-P. Penggunaan BDS-P sebagai stimulan dan fasilitator pengembangan sentra UKM dinilai tepat karena hubungan UKM dengan BDS-P didasarkan pada hubungan binsis, sehingga akan lebih terjamin kontinuitas pembinaannya.

Kinerja UKM yang berada dalam sentra yang telah maju relatif lebih baik dibandingkan dengan UKM yang berada dalam sentra yang belum maju. Hasil kajian mengindikasikan sentra yang dinamis di Indonesia umumnya memiliki kriteria sebagai berikut;

- a. jumlah UKM di dalam sentra rata-rata di atas 37 UKM
- b. Jumlah omzet penjualan atau nilai produksi dari seluruh UKM di dalam sentra rata-rata di atas Rp. 2.737.500.000,-per tahun
- c. Jumlah tenaga kerja di dalam sentra rata-rata di atas 147 orang
- d. Jumlah tambahan investasi di dalam sentra rata-rata diatas Rp. 52.000.000,- per tahun

Fungsi produksi sentra UKM mengindikasikan faktor-faktor produksi dan investasi berada pada stage II (elastisitas positif kurang dari 1), sedang jumlah UKM dan penggunaan bahan baku berada pada stage III (elastisitas negatif), sedang penggunaan tenaga kerja telah mencapai titik jenuh (elastisitas nol). Implikasinya, hanya variabel investasilah yang dapat dijadikan sebagai pemicu pengembangan sentra UKM, sedang variabel lainnya telah mencapai titik jenuhnya . Untuk itu, program MAP, penjaminan dan proses sertifikasi tanah UKM (Prona) diduga akan menjadi stimulan pengembangan sentra UKM di Indonesia.

Mengacu hasil analisis faktor-faktor produksi tersebut, berarti hampir seluruh faktor produksi telah jenuh (elastisitas nol atau negatif), maka inovasi dan teknologi menjadi kunci bagi pengembangan sentra UKM pada masa mendatang. Untuk itu maka pengembangan pasar sentra dan BDS serta peningkatan kualitas BDS-P diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti untuk memberdayakan proses inovasi dan penerapan teknologi yang sesuai untuk UKM yang beradadi dalam sentra. Implikasinya , Kementerian Koperasi dan UKM secara berkesinambungan mendorong pengembangan pasar sentra dan BDS, baik dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan dapat didorong dengan mendekatkan BDS-P dengan sentra dan mengembangkan program "voucher". Pada sisi penawaran, Kementerian Koperasi dan UKM perlu mengembangkan program peningkatan kualitas BDS-P dan program akreditasi serta sertifikasi BDS-P di Indonesia. Hasil observasi lapangan mengindikasikan kualitas sumberdaya manusia BDS-P yang ada relatif masih menjadi kendala untuk pengembangan pasar sentra dan BDS serta pengembangan sentra-sentra UKM

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pembangunan ekonomi lokal secara umum tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap perkembangan kinerja sentra UKM yang diukur dengan laju perubahan nilai tambah dan produktivitasnya. Indikator tersebut mengindikasikan belum adanya keterkaitan yang berarti antara dinamika perkembangan ekonomi lokal dengan sentra UKM.

2. Kebijakan finansial pemerintah kabupaten/kota secara umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan kinerja sentra UKM di daerahnya, kecuali untuk daerah provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan prioritas pengeluaran pembangunan di daerah umumnya belum mengarah pada sentra UKM dan cenderung memprioritaskan pada pembangunan lainnya. Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM perlu menstimulir dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan sentra UKM di wilayahnya. Hal ini dapat ditempuh dengan pengalokasian dana pengembangan sentra UKM untuk suatu daerah (MAP, BDS-P, pelatihan dan lain-lain, didasarkan pada ketersediaan dana padanan di daerah, kecuali untuk daerah yang minus. Untuk itu, perlu ditetapkan parameter penganggaran untuk pembangunan sentra pada masa mendatang.
3. Hasil kajian mengindikasikan hampir seluruh daerah kabupaten/kota telah menetapkan komoditas unggulan daerah. Proses penentuan komoditas unggulan umumnya didasarkan pada kapasitas produksi tanpa mencoba mengkaji keunggulan bersaing dari komoditas tersebut dibandingkan daerah lainnya. Hal ini menyulitkan bagi pemerintah daerah untuk menstimulir pengembangan komoditas unggulannya, karena ketidakjelasan variabel yang harus distimulir untuk mengembangkan daya saing komoditas tersebut. Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM perlu mengkoordinasikan kebijakan penentuan komoditas unggulan dan andalan daerah yang kriterianya di dasarkan pada konsep keunggulan bersaing, sehingga akan memudahkan pemerintah kabupaten/kota dalam menstimulir pengembangan komoditas unggulan daerahnya.
4. Efisiensi UKM yang berada di dalam sentra relatif lebih tinggi dibanding yang diluar sentra. Namun UKM diluar sentra menggunakan tenaga kerja lebih rasional dibandingkan UKM di dalam sentra. Penggunaan tenaga kerja di dalam sentra cenderung telah jenuh, sehingga penambahannya dapat mengurangi produktivitas dari sentra UKM tersebut.
5. Sentra dengan jumlah UKM lebih dari 30 orang pengusaha, relatif lebih dinamis daripada sentra yang memiliki dibawah 30 orang. Namun demikian sentra yang kecil umumnya memiliki efisiensi teknis yang lebih baik dibandingkan sentra yang besar. Hal ini mengindikasikan pola pembinaan sentra UKM selama ini tidak berkesinambungan. Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM perlu merumuskan pola pembinaan sentra UKM yang berkesinambungan serta mensosialisasikan upaya pembinaan sentra UKM tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota agar mampu membina sentra UKM secara berkesinambungan melalui BDS-P. Penggunaan BDS-P sebagai stimulan dan fasilitator pengembangan sentra UKM dinilai tepat karena hubungan UKM dengan BDS-P didasarkan pada hubungan binsis, sehingga akan lebih terjamin kontinuitas pembinaannya.
6. Kinerja UKM yang berada dalam sentra yang telah maju relatif lebih baik dibandingkan dengan UKM yang berada dalam sentra yang belum maju. Hasil

kajian mengindikasikan sentra yang dinamis di Indonesia umumnya memiliki kriteria sebagai berikut;

- a. Jumlah UKM di dalam sentra rata-rata di atas 37 orang PKM
 - b. Jumlah omzet penjualan atau nilai produksi dari seluruh UKM di dalam sentra rata-rata di atas Rp. 2.737.500.000,-per tahun
 - c. Jumlah tenaga kerja di dalam sentra rata-rata di atas 147 orang
 - d. Jumlah tambahan investasi di dalam sentra rata-rata diatas Rp. 52.000.000,- per tahun
7. Fungsi produksi sentra UKM mengindikasikan faktor-faktort produksi ivestasi berada pada stage II (elastisitas positif kurang dari 1), sedang jumlah UKM dan penggunaan bahan baku berada pada stage III (elastisitas negatif), sedang penggunaan tenaga kerja telah mencapai titik jenuh (elastisitas nol). Implikasinya, hanya variabel investasilah yang dapat dijadikan sebagai pemicu pengembangan sentra UKM, sedang variabel lainnya telah mencapai titik jenuhnya . Untuk itu, program MAP, penjaminan dan proses sertifikasi tanah UKM (Prona) diduga akan menjadi stimulan pengembangan sentra UKM di Indonesia.
 8. Hasil kajian mengindikasikan adanya perbedaan antara sentra UKM di Jawa dan luar Jawa, sehingga pola pembinaannnya seharusnya berbeda. Pengembangan sentra di Jawa dapat difokuskan pada upaya inovasi teknologi, stimulan investasi dan akses bahan baku, pada sentra diluar Jawa difokuskan pada upaya peningkatan kualitas SDM, akses pemasaran , inovasi teknologi
 9. Hampir seluruh faktor produksi telah jenuh (elastisitas nol atau negatif), maka inovasi dan teknologi menjadi kunci bagi [pengembangan sentra UKM pada masa mendatang. Untuk itu maka pengembangan pasar sentra dan BDS serta peningkatan kualitas BDS-P diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti untuk memberdayakan proses inovasi dan penerapan teknologi yang sesuai untuk UKM yang beradadi dalam sentra. Implikasinya , Kementerian Koperasi dan UKM secara berkesinambungan mendorong pengembangan pasar sentra dan BDS, baik dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan dapat didorong dengan mendekati BDS-P dengan sentra dan mengembangkan program “voucher”. Pada sisi penawaran, Kementerian Koperasi dan UKM perlu mengembangkan program peningkatan kualitas BDS-P dan program akreditasi serta sertifikasi BDS-P di Indonesia. Hasil observasi lapangan mengindikasikan kualitas sumberdaya manusia BDS-P yang ada relatif masih menjadi kendala untuk pengembangan pasar sentra dan BDS serta pengembangan sentra-sentra UKM
 10. Berdasarkan pendapat dari Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, dan FGD, kriteria komoditas unggulan sebagai berikut :
 - Menggunakan bahan baku lokal;
 - Sesuai dengan potensi dan kondisi daerah;
 - Memilliki pasar yang luas;
 - Mampu menyerap tenaga kerja relatif banyak;
 - Merupakan sumber pendapatan masyarakat;
 - Volume produksi relatif besar dan kontinyu;
 - Merupakan ciri khas daerah;

- Memiliki daya saing yang relatif tinggi;
 - Memiliki nilai tambah relatif tinggi;
 - Dapat memacu perkembangan komoditas yang lain.
11. Profil UKM contoh dari hasil kajian menunjukkan :
- Tingkat pendidikan pengelola UKM sentra rata-rata sekolah Menengah Atas (SMA);
 - Sebagian besar UKM memiliki tenaga kerja antara 1 sampai 10;
 - Tingkat pendidikan tenaga kerja tergolong rendah, kecuali di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur;
 - Keterampilan tenaga kerja tergolong rendah, kecuali di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur;
 - Bahan baku yang digunakan UKM bersumber dari alam dan lokal;
 - Modal rata-rata sebesar Rp. 10 juta, kecuali untuk provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan rata-rata Rp. 21 juta;
 - Modal awal dan modal kerja bersumber dari dana pribadi;
 - UKM kesulitan dalam mengakses dana dari lembaga keuangan karena prosedur yang relatif berbelit-belit dan memerlukan agunan;
 - Wilayah pemasaran produk yang dihasilkan UKM rata-rata pada lingkup lokal;
 - Teknologi yang digunakan UKM dalam proses produksi tergolong tradisional.
12. Model peningkatan daya saing UKM menekankan pada usaha pembentukan klaster UKM. Klaster UKM tersebut didukung oleh: a) sumberdaya alam dan manusia serta perekonomian lokal; b) program kemitraan; dan c) dukungan perkuatan berupa keuangan dan non keuangan. Dukungan perkuatan tersebut bersumber dari pemerintah pusat/lokal, lembaga keuangan, BUMN/BUMD, dan swasta. Keberadaan klaster UKM tersebut diharapkan membantu UKM dalam mengakses pasar, peningkatan kemampuan ekspor, menciptakan keunggulan kompetitif, dan memanfaatkan teknologi informasi.

VI. Daftar Pustaka

- Andadari, Roos K. 1998. Isu Peluang Bisnis Dinamika Krisis. Dalam :**Kekuatan Kolektif Sebagai Strategi Mempercepat Pemberdayaan Usaha Kecil**. Hasil Konferensi Nasional Usaha Kecil II. 7-8 Oktober 1998. editor: Edy Priyono, dkk. Center for Economic and Sosial Studies The Asia Foundation. Jakarta.
- Anonim 2001. Report Bantuan Teknis bagi Penguatan UKM Republik Indonesia, Proyek Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah: **Praktek Terbaik Dalam Menciptakan Suatu Lingkungan Yang kondusif Bagi UKM**, Asian Development Bank-GFA Manajement-Swisscontact Services. Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM.

- Blakely, J. Edward 1989. Planning Local Economic Development: **Theory and Practice** SAGE Publication, Inc California.
- Chotim, Erna Ermawati. 1998. Isu Pelayanan Birokrasi. Dalam: **Kekuatan Kolektif Sebagai Strategi Mempercepat Pemberdayaan Usaha Kecil**. Hasil Konferensi nasional Usaha kecil II. 7-8 Oktober 1998. Editor : Edy Priyono, dkk. Center for Economic and Sosial Studies The Asia Foundation, Jakarta.
- CIDES. 1997 **Undang-undang Persaingan Suatu Upaya Mendukung Persaingan Sehat**. Center for Information and Development Studies dan Kondrad Adenauer Stiftung. Jakarta.
- Irwan, Alexander. 1998. Isu Jaringan bisnis. Dalam: **Kekuatan Kolektif Sebagai Strategi mempercepat Pemberdayaan Usaha Kecil**. Hasil Konferensi nasional Usaha Kecil II. 7-8 Oktober 1998. editor:Edi Priyono, dkk. Center for Economic and Sosial Studies The Asia Foundation. Jakarta.
- Kartajaya, Hermawan. 2002. **Markplus on Strategi**". Gramedia. Jakarta
- Masngudi. Kebijkasanaan Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Menengah dan Kecil secara berkesinambungan. Dalam INFOKOP No.14 Tahun 1995 **Perkreditan dan Pembangunan Koperasi Serta Usaha Kecil**.
- Rustiani, Frida. 1996. Globalisasi: Masihkah Ekonomi Rakyat Boleh Berharap? Dalam Prosiding Dialog Nasional dan Lokakarya: **Pengembangan Ekonomi Rakyat Dalam Era Globalisasi: Masalah, Peluang dan Strategi Praktis**. Editor: Frida Rustiani. Yayasan AKATIGA dan YAPIKA. Bandung . 303 halaman.
- Soetrisno, Noer. **Nilai Dasar Koperasi Dalam Perspektif Perkembangan Global**. Infokop nomor 11, tahun IX Mei 1992
- . 1998. Kebijakan makro Perberdayaan Usaha kecil. Dalam: **Usaha Kecil Indonesia, Tantangan Krisis dan Globalisasi**. Kerjasama The Asia Foundation, Ikatan sarjana Ekonomi Indonesia, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Center for Economic and Sosial Studies. Jakarta.
- Tambunan, Mangara. 1998. pilihan Instrumen Kebijakan makro Ekonomi Untuk Pengembangan Usaha Kecil Indonesia Dalam: **Usaha Kecil Indonesia, Tantangan Krisis dan Globalisasi**.
- Shujiro Urata. 2000. **Policy Recommendation: Outline of tentattive Policy Rekomemendation for SME Promotion in Indonesia**. Publikasi JICA 17 Mei 2000.